

**PEMBERDAYAAN TENAGA FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
OLEH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RENA SARIRA

NIM. 170503132

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Prodi S1 Ilmu Perpustakaan



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2022M/1443 H**

SKRIPSI

**PEMBERDAYAAN TENAGA FUNGSIONAL PUSTAKAWAN OLEH DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH**

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi

Strata Satu (S1) Ilmu Perpustakaan

Disusun Oleh:

RENA SARIRA

NIM: 170503132

Mahasiswa Fakultas Adab Dan Humaniora

Jurusan S1 Ilmu Perpustakaan

Disetujui Untuk Sidang Munaqasyah Oleh :

جامعة الرانيري

Pembimbing I - R A N I R Y Pembimbing II


Nurrahmi, S.Pd.I., M.Pd
NIP. 197902222003122001


T. Mulkan Safri, M.IP
NIP. 199101082019031007

SKRIPSI

**PEMBERDAYAAN TENAGA FUNGSIONAL PUSTAKAWAN OLEH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH**

**Telah Diuji oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Perpustakaan**

**Pada Hari/Tanggal
Selasa, 27 Desember 2022**

**Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi**

Ketua

**NURRAHMI, S.Pd.I., M.Pd.
NIP.1979022222003122001**

Sekretaris

**T. MULKAN SAFRI, M.IP
NIP. 199101082019031007**

Penguji I

**Drs. SAIFFUDIN A.RASYID, M.L.I.S
NIP.196002052000031001**

Penguji II

**NURUL RAHMI, S.IP., MA
NIDN. 2031079202**

A R - R A N I R Y

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam – Banda Aceh**



**SYARIFUDDIN, M.Ag., Ph.D
NIP. 1970010111997031005**

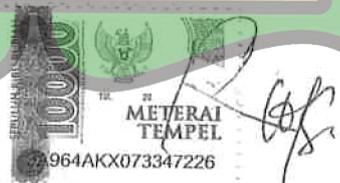
PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Rena Sarira
NIM : 170503132
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Jurusan : Ilmu Perpustakaan

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh 22 Desember 2022



Rena Sarira
NIM. 170503132

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “*Pemberdayaan Tenaga Fungsional Pustakawan Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh*”.

Selanjutnya shalawat dan salam penulis persembahkan kepada junjungan Alam Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memperjuangkan umatnya dari alam yang jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Orang tua, yang telah bersusah payah membesarkan dan membimbing penulis dengan limpahan kasih sayang, doa, pengorbanan serta bantuan yang tidak ternilai harganya sampai penulis bisa menjalani kuliah hingga selesai. Rasa terima kasih juga penulis ucapkan kepada suami Aris Maulizar, serta sahabat-sahabat penulis lia safwati, mutia fadilla, rika salfiti, grup inong agam 04, ciwi-ciwi ceunah dan kawan-kawan seperjuangan yang selaku suport sistem saya selama ini.

Selanjutnya terima kasih kepada Ibu Nurrahmi, M.Pd sebagai pembimbing pertama, dan bapak T. Mulkan Safri, M.IP sebagai pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sejak awal penelitian sampai selesainya penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT, penulis serahkan dan semoga kita semua mendapat rahmat dan karunianya serta mendapat balasan yang setimpal sesuai dengan amal perbuatan kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kelancaran pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi nantinya. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat.



DAFTAR ISI

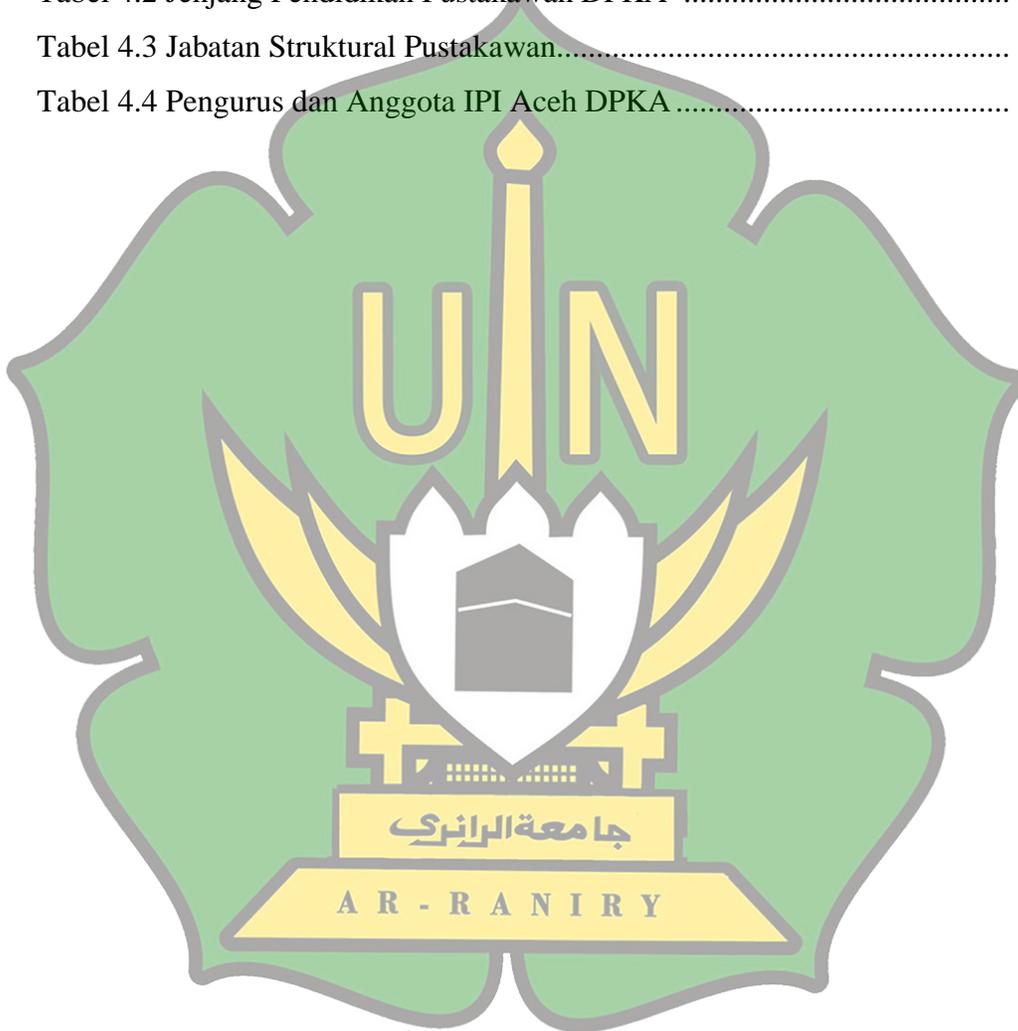
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	12
A. Kajian Pustaka	12
B. Tenaga Fungsional Pustakawan	17
1. Pengertian Tenaga Fungsional Pustakawan.....	17
2. Peran dan Tugas Tenaga Fungsional Pustakawan	19
C. Konsep Pemberdayaan Tenaga Fungsional Pustakawan.....	21
1. Pengertian Konsep Pemberdayaan Tenaga Fungsional Pustakawan	21
2. Tujuan Pemberdayaan Tenaga Fungsional Pustakawan.....	28
3. Kendala Dalam Tenaga Fungsional Pustakawan.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Rancangan Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Fokus Penelitian	34
D. Subjek dan Objek Penelitian	35
E. Kredibilitas Data	35
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	40
B. Hasil Penelitian.....	43
C. Pembahasan	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan	60

B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	65



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	40
Tabel 4.2 Jenjang Pendidikan Pustakawan DPKA	44
Tabel 4.3 Jabatan Struktural Pustakawan.....	49
Tabel 4.4 Pengurus dan Anggota IPI Aceh DPKA	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 4 Daftar Pedoman Wawancara



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pemberdayaan Tenaga Fungsional Pustakawan Oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dan kendala yang dihadapi dalam melakukan pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data observasi, dan wawancara. Hasil penelitian diketahui pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dilakukan dalam bentuk pembinaan karir pustakawan melalui pendidikan formal dan non formal, pembinaan karir pustakawan melalui pelatihan, pembinaan karir pustakawan melalui posisi kerja berdasarkan jabatan dan keahlian, dan pembinaan karir pustakawan melalui organisasi profesi. Kendala yang dihadapi dalam melakukan pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh yaitu kesesuaian jadwal antara bidang satu dengan bidang lainnya, keterbatasan anggaran, dan kebijakan.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Tenaga Fungsional, Pustakawan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perpustakaan berperan penting bagi kehidupan masyarakat dan dunia pendidikan. Terlebih perpustakaan umum yang diperuntukkan bagi semua kalangan. Perpustakaan Daerah Provinsi merupakan Perpustakaan Umum Wilayah Provinsi yang berfungsi sebagai pusat koordinasi serta pengembangan perpustakaan dalam provinsi. Apabila melihat dari fungsinya, maka Perpustakaan daerah Provinsi sangat berperan penting terhadap perkembangan keilmuan dan pengetahuan masyarakat luas, terutama wilayah Provinsi yang bersangkutan.

Pustakawan merupakan sumber daya manusia penentu keberhasilan dalam penyebarluasan informasi yang ada pada perpustakaan. Menurut Undang-undang R.I. No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan pasal 29, menyatakan bahwa sumber daya manusia di perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan, misalnya tenaga teknik komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan. Sedangkan yang dimaksud pustakawan adalah seseorang yang memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi di bidang perpustakaan.¹

Pustakawan sendiri telah diakui oleh pemerintah sebagai jabatan fungsional semenjak dikeluarkannya keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

¹ Lasa Hs. *Manajemen Perpustakaan*. Yogyakarta: Gramedia. 2008. Hal. 62

Negara Nomor 18/MENPAN/1998 tentang jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Dalam rangka memenuhi tuntutan karier dan peningkatan profesionalisme pustakawan, keputusan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 dan telah diperbarui menjadi PERMENPAN Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Sejak saat itulah setiap kegiatan yang dikerjakan oleh pustakawan dinilai berdasarkan angka kredit yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis jabatan fungsional dan angka kreditnya.² Mengingat arti pentingnya peran pustakawan di sebuah perpustakaan maka perlu diadakan pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan.

Pemberdayaan adalah pemberian wewenang kepada karyawan untuk merencanakan, mengendalikan dan membuat keputusan tentang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya tanpa harus mendapatkan otorisasi secara eksplisit dari manajer di atasnya.³ Menurut Zubaedi, Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk

² Maya Nurmaya Hasanah, *Pengaruh Jabatan Fungsional Terhadap Kinerja Pustakawan Di Perpustakaan Universitas Indonesia*, Jurnal Ilmu Perpustakaan, Vol. 7 No. 1, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2019), 7, diakses melalui <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/22831/20877>, tanggal 03 September 2021

³ Gomes, Faurtino Cardoso. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2003. Hal. 26.

mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.⁴ Nisjar dalam Sedarmayanti menyebutkan bahwa pemberdayaan dapat dilakukan melalui pendelegasian wewenang, pemberian wewenang, sehingga diharapkan orang lebih fleksibel, efektif, inovatif, kreatif, etos kerja tinggi yang pada akhirnya produktivitas organisasi menjadi meningkat.⁵ Dalam dunia perpustakaan, pemberdayaan pustakawan merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pustakawan. Tujuan dari pemberdayaan itu sendiri adalah untuk meningkatkan mutu, keterampilan, serta memupuk kegairahan pustakawan dalam kegiatan fungsionalnya, agar terciptanya mutu pelayanan yang baik dan terciptanya kepuasan pengunjung.⁶ Tenaga fungsional pustakawan merupakan jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan.⁷ Kegiatan fungsional disini dapat diartikan sebagai kegiatan pustakawan dalam jabatan fungsional yang telah dimiliki.

⁴ Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007). Hal 42

⁵ *Ibid*, 68

⁶ Rahmi Wati, *Pemberdayaan Pejabat Fungsional Tertentu Studi Kasus Pada Jabatan Peneliti Dan Perencana Di Bappeda Provinsi Bengkulu*, *Civil Service* VOL. 11, No.2, (2017), 68, diakses melalui <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1481189&val=17805&title=PEMBERDAYAAN%20PEJABAT%20FUNGSIONAL%20TERTENTU>, tanggal 21 September 2021

⁷ Perpustakaan Nasional, *Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2015). Hal 3

Berdasarkan "Menpan No. 132/KEP/M.PAN/12/2002 Bab 1 Pasal butir 1" dijelaskan bahwa pejabat fungsional pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, dan tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepastakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya. Sejalan dengan undang-undang perpustakaan No. 43 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa pustakawan berhak atas pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Karena itu, dengan adanya pembinaan maka diharapkan seseorang tersebut dapat mengembangkan dan menyempurnakan keahlian yang dimilikinya agar siap untuk menempuh tahapan atau jenjang karirnya sebagai seorang pustakawan.⁸

Jabatan fungsional pustakawan bertujuan untuk pembinaan pangkat bagi seseorang yang memiliki profesi pustakawan, artinya perpustakaan telah menerapkan pelatihan untuk para pustakawan melalui pembinaan karir. Pemberdayaan pustakawan biasanya dilakukan melalui pembinaan pendidikan formal, non formal, in-formal maupun pembinaan pelatihan kepastakawanan. Selain itu, alasan pemberian pemberdayaan tersebut perlu dilakukan agar pustakawan tidak tertinggal dengan pengetahuan yang hanya didapatkan melalui jenjang pendidikan saja sehingga pustakawan dapat bersaing dalam memberikan kinerja yang lebih baik dalam melakukan pekerjaannya. Dengan basic pendidikan

⁸ Muhammad Rum & Anwar Sadat, *Pengembangan Karir Pustakawan Di Lingkungan Badan Perpustakaan Dan Arsip Provinsi Jambi: Tinjauan Terhadap Undang-undang No. 43 Tahun 2007*. (Jambi: Lembaga Penelitian IAIN STS Jambi, 2013). Hlm. 1

di bidang perpustakaan, pustakawan paling tidak dapat mengimbangi kebutuhan pemustaka dalam bidang informasi dan pelayanan. Selain dari segi latar belakang (*basic*) pustakawan harus memiliki kemampuan lain, seperti kemampuan berkomunikasi dengan baik, mengembangkan teknik dalam bidangnya. Melalui pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan ini, diharapkan kendala-kendala dalam bidang kinerja pustakawan dapat ditingkatkan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh telah melakukan pemberdayaan pada tenaga fungsional pustakawan baik ditingkat provinsi hingga nasional. Pemberdayaan dalam tingkat provinsi merupakan program yang dilakukan untuk memberdayakan pustakawan pada lingkungan provinsi Aceh.⁹ Kegiatan tersebut seperti adanya pembinaan yang dilakukan yaitu dengan menyertakan pustakawan pada kegiatan baik sebagai pembicara maupun peserta kegiatan.

Selain itu, pemberdayaan di tingkat provinsi lainnya yang rutin dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh adalah dengan adanya Pustakawan berprestasi, dengan tujuan memberikan penghargaan terhadap pustakawan terbaik sehingga pustakawan dapat lebih meningkatkan profesionalisme dalam bekerja dan meningkatkan motivasi, inovasi, etos kerja pustakawan serta mewujudkan citra pustakawan sebagai profesi yang dapat dibanggakan. Dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan telah menjadikan pustakawan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh lebih mandiri dalam bekerja serta menambah

⁹ Wawancara dengan Ibu Yasmi Yendri, S.IP, pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 23 Juni 2022.

wawasan dan meningkatkan kompetensi diri pustakawan sebagai penunjang dalam bekerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.¹⁰

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan ibu Yasmi Yendri, S.IP di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh terdapat beberapa permasalahan di dalam proses pemberdayaan ini, salah satunya keterbatasan anggaran dana untuk para pustakawan yang ingin melakukan pembinaan. Kondisi seperti ini jelas akan berdampak pada kinerja para pustakawan serta pada pengembangan perpustakaan tersebut.¹¹

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul **Pemberdayaan Tenaga Fungsional Pustakawan Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh?
2. Apa saja kendala dalam melakukan pemberdayaan tenaga fungsional oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh?

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Yasmi Yendri, S.IP, pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 23 Juni 2022.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Yasmi Yendri, S.IP, pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 23 Juni 2022

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian berdasarkan masalah yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kegiatan pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh?
2. Upaya untuk mengatasi kendala dilapangan?

D. Manfaat dan Kegunaan

Adapun manfaat dari penelitian dibedakan menjadi dua (2) yaitu:

1. Manfaat ilmiah
 - a. Menjadi rujukan bagi para peneliti yang akan meneliti masalah yang sama atau berhubungan dengan objek kajian ini.
 - b. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam hal pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan.
2. Manfaat praktis
 - a. Memberikan masukan dan pengembangan dalam melakukan pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.
 - b. Menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya terkait pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan.

E. Penjelasan Istilah

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Tenaga Fungsional Pustakawan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan -m- dan akhiran -an menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan.¹²

Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.¹³

¹² Rosmedi Dan Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006), hal 1

¹³ Edi Sugarto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Ravika Adimatama 2005). Hal 57-58.

Selanjutnya, Sri Hariyanti menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses yang pada intinya bertujuan dalam mewujudkan perubahan. Oleh karenanya, dari mana kita bisa melihat bahwa individu terdorong dan bergerak untuk melakukan sebuah tindakan yang mandiri, memiliki motivasi, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama dan terciptanya kesejahteraan.¹⁴

Dalam dunia perpustakaan pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan merupakan pembinaan terhadap sumber daya manusia yang ada di perpustakaan yaitu pustakawan. Diperlukan sebuah pembinaan bagi profesi pustakawan, untuk meningkatkan mutu serta kualitas tiap-tiap pustakawan. konsep pemberdayaan pustakawan dilakukan dengan pembinaan karir pustakawan melalui 4 indikator yaitu pembinaan karir pustakawan melalui pendidikan, pelatihan, posisi kerja berdasarkan jabatan dan keahlian, dan organisasi profesi.¹⁵

Menurut Lasa Jabatan Fungsional adalah kedudukan seorang pegawai dalam suatu lembaga/instansi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu, bersifat mandiri, memiliki tanggung jawab dan untuk pengangkatan/kenaikan jabatan disyaratkan dengan prestasi

¹⁴ Sri Hariyanti, Noviliya, *Pengaruh Pemberdayaan Kinerja Fungsional Pustakawan Terhadap Kualitas Perpustakaan (Studi Kasus Perpustakaan Daerah Kota Kediri)*, (Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2020), 4, diakses melalui <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/joiem/article/view/1992>, tanggal 18 Agustus 2021.

¹⁵ Muhammad Rum, *Model Pembinaan Karir Pustakawan di Lingkungan Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Provinsi Jambi*. (Jambi: 2013) hal 10.

yang dapat dinilai sebagai angka kredit yang ditentukan.¹⁶ Selanjutnya, Jabatan Fungsional Pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepastakawanan.¹⁷

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan disini merupakan serangkaian bentuk kegiatan terhadap pembinaan pustakawan oleh Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh baik dari segi pendidikan, pelatihan dan lainnya untuk meningkatkan kualitas kemampuan kerjanya dalam melayani atau mengimbangi kebutuhan pemustaka dalam bidang informasi dan pelayanan.

2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh merupakan perpustakaan umum yang terletak di provinsi Aceh. Umumnya pengguna perpustakaan merupakan masyarakat setempat dari berbagai unsur baik dari segi mahasiswa, pelajar dan masyarakat umum lainnya dengan beragam profesi.

Adapun Dinas perpustakaan dan kearsipan Aceh yang dimaksud penulis dalam penelitian ini yaitu Bidang pembinaan, pengembangan dan

¹⁶ Lasa Hs, *Kamus Kepustakawanan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009), 121.

¹⁷ Perpustakaan Nasional, *Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2015).

pengawasan Dinas perpustakaan dan kearsipan Aceh yang melakukan pemberdayaan terhadap tenaga fungsional pustakawan yang berada di lingkungan instansinya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap beberapa literatur terdapat penelitian yang sejenis yang berkaitan dengan topik pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Meskipun beberapa penelitian ini memiliki kemiripan, namun terdapat perbedaan-perbedaan dalam hal variabel, fokus penelitian, tempat serta waktu penelitian.

Penelitian pertama, berjudul “Pengaruh Pemberdayaan Kinerja Fungsional Pustakawan terhadap Kualitas Perpustakaan (Studi Kasus Perpustakaan Daerah Kota Kediri)” yang ditulis oleh Sri Yanti dan Noviliya pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pengaruh pemberdayaan kinerja dalam kegiatan fungsional pustakawan, dan beberapa faktor yang mempengaruhi pemberdayaan kinerja pustakawan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat atau kendala pada kegiatan fungsional pustakawan dalam mengembangkan kualitas perpustakaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh pemberdayaan kinerja pustakawan dengan kualitas perpustakaan di perpustakaan daerah kota kediri , dimana pustakawan dituntut untuk lebih

professional, memiliki etos kerja yang tinggi, kompeten dalam bidangnya, serta adanya upaya-upaya perbaikan beberapa faktor penghambat.¹⁸

Berdasarkan penelitian di atas, ada persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis sekarang. Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan Daerah dan sama-sama menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu, dari segi tujuan dan lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan di perpustakaan Daerah Kota Kediri tahun 2020, dengan tujuan mengetahui bagaimana pengaruh pemberdayaan kinerja dalam kegiatan fungsional pustakawan, dan beberapa faktor yang mempengaruhi pemberdayaan kinerja pustakawan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat atau kendala pada kegiatan fungsional pustakawan dalam mengembangkan kualitas perpustakaan. Sedangkan dalam tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dan Untuk mengetahui kendala dalam melakukan pemberdayaan tenaga fungsional oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

¹⁸ Sri Yanti dan Noviliya, *Pengaruh Pemberdayaan Kinerja Fungsional Pustakawan Terhadap Kualitas Perpustakaan (Studi Kasus Perpustakaan Daerah Kota Kediri)*, JoIEM, Vol.1, No.1, April 2020 Institut Agama Islam Negeri Kediri. Diakses melalui <https://ojs.iainkediri.ac.id>

Penelitian kedua berjudul Pemberdayaan Tenaga Fungsional Pustakawan Di Badan perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang ditulis oleh Astri Sulastri pada tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan di Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat, serta mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dialami dalam pelaksanaan pemberdayaan tenaga fungsional pustakawannya. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Perpustakaan daerah Provinsi Jawa Barat melakukan berbagai upaya pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan diantaranya melalui pendidikan formal, mengikuti pelatihan-pelatihan ilmu perpustakaan, berperan serta dalam penyuluhan-penyuluhan, diberi kesempatan mengajar diklat-diklat atau sosialisasi perpustakaan sebagai pengembangan potensi serta magang di perpustakaan lain, berperan serta dalam seminar, baik menjadi peserta, moderator maupun menjadi narasumber.¹⁹

Berdasarkan penelitian di atas, ada persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis sekarang. Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan Daerah dan sama-sama menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang

¹⁹ Astri Sulastri, *Pemberdayaan Tenaga Fungsional Pustakawan Di Badan perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat*, (Skripsi, Universitas UIN Sunan Kalijaga, 2009), Akses 2 Juni 2022. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/2964/>.

sedang dilakukan yaitu, dari segi tujuan dan lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan di perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009, dengan tujuan mengetahui pelaksanaan pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan di Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat, serta mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dialami dalam pelaksanaan pemberdayaan tenaga fungsional pustakawannya. Sedangkan dalam tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dan Untuk mengetahui kendala dalam melakukan pemberdayaan tenaga fungsional oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

Penelitian Ketiga berjudul Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Jambi. Yang ditulis oleh May Nurul Astuti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi, faktor-faktor kendala yang dihadapi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi, dan upaya apa saja yang dilakukan guna mengatasi kendala dalam melakukan pemberdayaan sumber daya manusia di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif, metode pengambilan data menggunakan *Purposive Sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan sumber daya manusia yang dilakukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi masih belum optimal karena terbukti dengan minimnya pegawai yang berlatar belakang keilmuan perpustakaan dan kurangnya tenaga pustakawan sehingga terhambatnya kegiatan pelayanan dan itu terlihat dari koleksi yang belum tertata rapi pada rak seharusnya dan pegawai yang jarang ada dimeja kerja saat dibutuhkan pemustaka, serta belum adanya pemerataan pembinaan dan pengembangan pada semua pegawai.²⁰

Berdasarkan penelitian di atas, ada persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis sekarang. Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan Daerah dan sama-sama menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu, dari segi tujuan dan lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan di perpustakaan Kota Jambi pada tahun 2019, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi, faktor-faktor kendala yang dihadapi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi, dan upaya apa saja yang dilakukan guna mengatasi kendala dalam melakukan pemberdayaan sumber daya manusia di Dinas Kearsipan dan

²⁰ May Nurul Astuti, *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Jambi*, (Skripsi, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), 2019. [https:// repository.uinjambi.ac.id](https://repository.uinjambi.ac.id). Akses pada tanggal 4 Juni 2022.

Perpustakaan Kota Jambi. Sedangkan dalam tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dan Untuk mengetahui kendala dalam melakukan pemberdayaan tenaga fungsional oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

B. Tenaga Fungsional Pustakawan

1. Pengertian Tenaga Fungsional Pustakawan

Berdasarkan Undang-undang No. 43 Tahun 2007 pasal 1 ayat 8 bahwa pustakawan adalah seorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.²¹

Menurut Sulistyio Basuki pustakawan adalah orang yang memberikan dan melaksanakan kegiatan perpustakaan dalam usaha pemberian layanan kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi lembaga induknya.²²

Kemudian Soetimah menyatakan bahwa pustakawan adalah pegawai negeri sipil yang berijazah di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang diberi tugas secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perpustakaan dan dokumentasi pada unit-unit perpustakaan instansi

²¹ Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Hal. 12.

²² Sulistyio Basuki. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1993).

pemerintah dan atau unit-unit tertentu lainnya.²³ Pustakawan sebagai profesi berarti secara moral pustakawan harus dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan yang dilakukannya, baik terhadap sesama profesi pustakawan, terhadap organisasi, maupun terhadap dirinya sendiri.

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwasanya pustakawan merupakan seorang yang mempunyai kompetensi/keahlian yang mampu bekerja di perpustakaan sebagai wujud dalam mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan.

Tenaga fungsional disini diartikan sebagai jabatan fungsional pustakawan. Jabatan fungsional pustakawan merupakan suatu jabatan yang memberikan kesempatan bagi pegawai negeri sipil (PNS) untuk mencapai kariernya dengan memilih menurut kesadaran pribadi mengenai jenis pekerjaan yang akan di tempuh atau dipilihnya serta arti pekerjaan tersebut bagi instansi maupun dirinya sendiri. Penetapan jabatan fungsional ditetapkan pada kriteria sebagai berikut, antara lain: memiliki metodologi, teknik analisis, memiliki sertifikasi atas pelatihan teknis, memiliki etika profesi, dan lain sebagainya.²⁴

Berdasarkan "Menpan No. 132/KEP/M.PAN/12/2002 Bab 1 Pasal butir 1" dijelaskan bahwa pejabat fungsional pustakawan adalah Pegawai

²³ Soetimah. *Perpustakaan, Kepustakaan dan Pustakawan*. (Yogyakarta: Kanisius. 1992). Hal. 161.

²⁴ Sri Yanti dan Noviliya, *Pengaruh Pemberdayaan Kinerja Fungsional Pustakawan Terhadap Kualitas Perpustakaan (Studi Kasus Perpustakaan Daerah Kota Kediri)*, JoIEM, Vol.1, No.1, April 2020 Institut Agama Islam Negeri Kediri. Diakses melalui <https://ojs.iainkediri.ac.id>

Negeri Sipil yang diberi tugas, dan tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepastakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya.²⁵

Lasa mengungkapkan bahwa jabatan fungsional pustakawan adalah kedudukan karir pada unit perpustakaan hanya bisa ditempati oleh seseorang yang berasal dari lulusan basic perpustakaan dan diangkat sebagai PNS atau pegawai tetap perpustakaan lembaga tertentu.²⁶

Jabatan fungsional pustakawan bertujuan untuk pembinaan pangkat bagi seseorang yang memiliki profesi pustakawan, artinya perpustakaan telah menerapkan pelatihan untuk para pustakawan melalui pembinaan karir.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwasanya tenaga fungsional pustakawan merupakan jabatan yang dimiliki oleh seseorang yang berasal dari background bidang perpustakaan, baik yang diangkat sebagai PNS ataupun pegawai tetap dalam sebuah perpustakaan.

2. Peran dan Tugas Tenaga Fungsional Pustakawan

Peran pustakawan sebagai tenaga profesional sebagaimana diatur dalam *Keputusan MEMPAN No.132/KEP/M.PAN/12/2002* yakni peran yang

²⁵ Anton Risparyanto, *Pengaruh Jabatan Fungsional Terhadap Motivasi Kerja Pustakawan: Studi Kasus Di Direktorat Perpustakaan Uii*, Jurnal Perpustakaan Vol. 5 No. 1 Tahun 2014. <https://jurnal.uii.ac.id>. Akses 2 juni 2022.

²⁶ Widayanti, *Pengembangan Karir Pustakawan Melalui Jabatan fungsional*, Libraria: Jurnal Perpustakaan 1196 4267 1 PB. <https://123.com> pdf

utama adalah sebagai pengorganisasi bahan pustaka bagi pemenuhan kebutuhan pemakai dan sebagai pembimbing tentang cara-cara bagaimana menggunakan bahan pustaka untuk kepentingan pemakai sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam pencapaiannya, maka pustakawan harus selalu berupaya dalam mengembangkan kinerjanya terhadap tugas fungsionalnya menuju ke arah yang lebih baik dengan lebih memfokuskan pada kualitas layanan terhadap pengunjung perpustakaan.²⁷

Adapun seorang pustakawan juga memiliki tugas-tugas pokok. Tugas pokok pustakawan adalah kegiatan dibidang kepustakawan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan dan pengembangan sistem kepustakawanan yang dilakukan oleh setiap pustakawan sesuai jenjang jabatannya. Tugas pokok pustakawan antara lain, yaitu :

a. Tugas pokok pustakawan keterampilan, meliputi ;

1) Pengelolaan perpustakaan, terdiri atas :

a) Perencanaan penyelenggaraan kegiatan perpustakaan.

b) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perpustakaan.

2) Pelayanan perpustakaan, terdiri atas ;

a) Pelayanan teknis

²⁷ Sri Yanti dan Noviliya, *Pengaruh Pemberdayaan Kinerja Fungsional Pustakawan Terhadap Kualitas Perpustakaan (Studi Kasus Perpustakaan Daerah Kota Kediri)*, JoIEM, Vol.1, No.1, April 2020 Institut Agama Islam Negeri Kediri. Diakses melalui <https://ojs.iainkediri.ac.id>

b) Pelayanan pemustaka

3) Pengembangan sistem kepastakawanan

a) Pengembangan kepastakawanan

b. Tugas pokok kepastakawanan keahlian, meliputi ;

1) Pengelolaan perpustakaan, terdiri atas ;

a) Perencanaan penyelenggaraan kegiatan perpustakaan

b) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perpustakaan.

2) Pelayanan perpustakaan, terdiri atas ;

a) Pelayanan teknis

b) Pelayanan pemustaka

3) Pengembangan sistem kepastakawanan, terdiri atas ;

a) Pengkajian kepastakawanan

b) Pengembangan kepastakawanan

c) Penganalisisan/pengkritisian karya kepastakawanan

d) Menelaah pengembangan sistem kepastakawanan.²⁸

C. Konsep Pemberdayaan Tenaga Fungsional Pustakawan

1. Pengertian Konsep Pemberdayaan Tenaga Fungsional Pustakawan

Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada

²⁸ Opung Sumiati, dkk, *Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2015), hlm 9-10.

kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.²⁹

Menurut Khan Pemberdayaan merupakan hubungan antara personal yang berkelanjutan untuk membangun kepercayaan antara karyawan dan manajemen, sedangkan Mulyadi dan Setyawan berpendapat bahwa pemberdayaan adalah pemberian wewenang kepada karyawan untuk merencanakan, mengendalikan dan membuat keputusan tentang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya tanpa harus mendapatkan otorisasi secara eksplisit dari manajer di atasnya. Menurut Ginandjar Kartasasmitha menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun

²⁹ Edi Sugarto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Ravika Adimatama 2005). Hal 57-58.

daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.³⁰

Dalam dunia perpustakaan, pemberdayaan pustakawan merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pustakawan. Tujuan dari pemberdayaan itu sendiri adalah untuk meningkatkan mutu, keterampilan, serta memupuk kegairahan pustakawan dalam kegiatan fungsionalnya, agar terciptanya mutu pelayanan yang baik dan terciptanya kepuasan pengunjung.³¹ Tenaga fungsional pustakawan merupakan jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan.³² Melalui pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan ini, diharapkan kendala-kendala dalam bidang kinerja pustakawan dapat ditingkatkan.

Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan proses pembinaan adalah serangkaian bentuk kegiatan terhadap pembinaan pustakawan agar

³⁰ Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT Pusaka Cisendo,1996). Hal 145

³¹ Rahmi Wati, *Pemberdayaan Pejabat Fungsional Tertentu Studi Kasus Pada Jabatan Peneliti Dan Perencana Di Bappeda Provinsi Bengkulu*, Civil Service VOL. 11, No.2, (2017), 68, diakses melalui <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1481189&val=17805&title=PEMBERDAYAAN%20PEJABAT%20FUNGSIONAL%20TERTENTU>, tanggal 21 September 2021

³² Perpustakaan Nasional, *Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2015). Hal 3

pustakawan benar-benar mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab dan terlibat dalam pengambilan keputusan serta dalam pemecahan masalah.

Dalam hal ini konsep pemberdayaan pustakawan dilakukan dengan pembinaan karir pustakawan melalui 4 indikator. Pembinaan karir sebagai sebuah konsep maka harus disusun sedemikian rupa, sehingga menjamin terciptanya kondisi objektif yang dapat mendorong peningkatan para pegawai. Dengan adanya pembinaan karir pustakawan, maka memberikan kesempatan kepada pustakawan untuk mempersiapkan diri mengembangkan karir dan kemampuannya. Muhammad rum di dalam artikelnya mengemukakan terdapat empat indikator bentuk pembinaan karir pustakawan yang dilakukan oleh suatu perpustakaan, yaitu:³³

a. Pembinaan karir pustakawan melalui pendidikan

Pendidikan merupakan indikator penting dalam menentukan kemampuan kerja pustakawan. Pendidikan dan pengalaman kerja merupakan langkah awal untuk melihat kemampuan seseorang. Menurut Hasibuan pendidikan merupakan indikator yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan. Dengan latar belakang pendidikan pula seseorang

³³ Muhammad Rum, *Model Pembinaan Karir Pustakawan di Lingkungan Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Provinsi Jambi*. (Jambi: 2013) hal 10.

dianggap akan mampu menduduki suatu jabatan tertentu. Terdapat beberapa macam jenis pendidikan, diantaranya:

1. Pendidikan Formal

Pendidikan pustakawan melalui pendidikan formal dapat dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan tinggi, seperti universitas, institut, atau sejenisnya yang menyelenggarakan program diploma, sarjana, magister atau doktor di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Pendidikan formal tersebut dapat dilakukan di dalam maupun di luar negeri

2. Pendidikan Non Formal

Disamping pendidikan formal, terdapat pula pendidikan non-formal. Pembinaan melalui pendidikan informal bertujuan untuk meningkatkan kualitas pustakawan secara bersama-sama, dan dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), penataran (up grading), simposium, seminar, lokakarya, kursus, magang (on the job training), studi banding, dan sebagainya. Terdapat dua jenis diklat sebagai berikut:

- a. Diklat Teknis Perpustakaan, seperti: Diklat teknis pengelola perpustakaan, Diklat teknis pengenalan perpustakaan dan Diklat tenaga ahli perpustakaan.

- b. Diklat Fungsional, seperti: Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli (CPTA), Diklat Alih Jalur Pustakawan dan Diklat Tim Penilai Pustakawan.

3. Pendidikan Informal

Untuk mengembangkan diri, belajar dengan sesama, menimba pengalaman orang lain serta menjalin hubungan dengan rekan sejawat dapat dilakukan melalui pendidikan informal baik secara individual maupun organisasi didalam suatu organisasi profesi. Pembinaan yang bersifat individual antara lain dengan belajar sendiri, terutama dengan membaca, di samping belajar dari pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. Pustakawan dapat belajar dari berbagai sumber, termasuk yang diterbitkan oleh organisasi profesi. Setiap individu dapat mengembangkan dirinya, mengadakan hubungan informal dengan teman sejawat. Dengan seringnya berdiskusi sesama teman sejawat maka dapat menambah informasi, pengetahuan seputar kepustakawanan.

b. Pembinaan Pustakawan melalui Pelatihan

1. Pelatihan Bimtek (Bimbingan Teknis)

Bimbingan Teknis disingkat Bimtek adalah suatu kegiatan dimana para peserta diberikan pelatihan berupa tuntutan yang

bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi yang bersifat teknis untuk memecahkan permasalahan dan menyelesaikan pekerjaan. Salah satu contoh Bimtek di bidang perpustakaan adalah Bimbingan Teknis bagi pengelola perpustakaan, seperti bimbingan pengkatalogan, pengklasifikasian, penginputan koleksi ke katalog online melalui software Slims, inlislite, dan lain sebagainya.

c. Pembinaan Karir Pustakawan Melalui Posisi Kerja Berdasarkan Jabatan dan Keahlian

Di dalam suatu organisasi pemerintahan maka akan dikenal istilah jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu sistem organisasi negara. Sedangkan jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Agar terjadi pemerataan posisi dalam jabatan yang sesuai dengan keahlian, maka pimpinan harus memahami tugas pustakawan sesuai dengan tingkatannya.

d. Pembinaan Karir Pustakawan Melalui Organisasi Profesi

Setiap profesi yang dilakoni oleh individu atau kelompok dalam suatu lembaga maka dibutuhkan lembaga formal yang dapat memberikan ruang untuk berkembang maupun belajar menambah wawasan dan pengalaman. Di bidang perpustakaan, telah banyak berdiri organisasi profesi pustakawan seperti Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), Asosiasi Perpustakaan Sekolah Indonesia (APUSI), Forum Perpustakaan Peguruan Tinggi Indonesia (FPPTI), Jaringan Perpustakaan Peguruan Tinggi Islam Indonesia, dan lain sebagainya.³⁴

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan konsep pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan dilakukan dalam bentuk pembinaan karir pustakawan melalui pendidikan, Pembinaan Pustakawan melalui pelatihan, pembinaan karir pustakawan melalui posisi kerja berdasarkan jabatan dan keahlian dan pembinaan karir pustakawan melalui organisasi profesi.

2. Tujuan Pemberdayaan Tenaga Fungsional Pustakawan

Sumber yang ada dalam organisasi adalah keberadaan sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan manajemen atau organisasi dalam

³⁴ Wenny Dastina dan Arsyad Nuzul Hikmat, *Bentuk Pembinaan Karir Pustakawan Di Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Jambi*, Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi Vol. 1 No. 1 2018. Diakses 14 Juni 2022 dari situs <http://repository.uinjambi.ac.id>

rangka pelaksanaan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari pemberdayaan pegawai adalah untuk memperbaiki efektifitas kerja pegawai dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Perbaikan efektifitas kerja tersebut dapat dilakukan dengan cara memperbaiki pengetahuan dan keterampilan pegawai maupun sikap pegawai itu sendiri terhadap tugas-tugasnya. Menurut Manulang dalam Sartono mengemukakan bahwa tujuan pemberdayaan pegawai adalah untuk menambah pengetahuan, menambah keterampilan dan merubah sikap. Selanjutnya menurut Dale Yoder, Alfred Laitener dan Joseph Triffin dikutip dari May Nurul Astuti tujuan pemberdayaan pegawai pada umumnya adalah:

- a. Supaya pegawai dapat melakukan pekerjaan dengan lebih efisien. Dengan diadakan suatu pemberdayaan yang disusun secara cermat dan didasarkan pada metode yang berpedoman pada keterampilan yang dibutuhkan diharapkan dapat melaksanakan pekerjaan dengan lebih efisien.
- b. Supaya pengawasan lebih sedikit dilakukan terhadap pegawai. Pemberdayaan pegawai yang berpedoman pada keterampilan di harapkan menghasilkan pegawai yang cakap dan keterampilan akan dapat bekerja lebih efektif dan efisien yang mana akan berdampak pada berkurangnya pengawasan yang dilakukan oleh atasan.
- c. Supaya pegawai lebih cepat berkembang. Dengan adanya pemberdayaan pegawai, salah satu harapan adalah hasil kerja yang lebih baik dan prestasi

pegawai yang meningkat, maka adanya daya saing akan makin besar. Dengan demikian tujuan organisasi dapat tercapai.³⁵

Dalam bidang perpustakaan, pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dalam bidang kepustakawanan untuk mendukung kinerja pustakawan. Usaha pemberdayaan Jabatan Fungsional pustakawan dalam hal ini harus ditingkatkan demi tercapainya tujuan organisasi perpustakaan.³⁶ Tujuan pemberdayaan itu sendiri adalah untuk meningkatkan mutu, keterampilan, serta memupuk kegairahan pustakawan dalam kegiatan fungsionalnya, agar terciptanya mutu pelayanan yang baik dan terciptanya kepuasan pengunjung.³⁷

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwasanya tujuan pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan yaitu untuk meningkatkan efektifitas kinerja pustakawan dalam kegiatan fungsionalnya sehingga terciptanya kepuasan pengguna perpustakaan.

³⁵ May Nurul Astuti, *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Jambi*, (Skripsi, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), 2019. [https:// repository.uinjambi.ac.id](https://repository.uinjambi.ac.id). Akses pada tanggal 4 Juni 2022.

³⁶ Erya Afrianus, *Lebih Dekat Dengan Jabatan Fungsional*, 1, diakses melalui <https://pusdiklat.bps.go.id/files/lain-lain/LEBIH%20DEKAT%20DENGAN%20JABATAN%20FUNGSIONAL.pdf>, tanggal 21 September 2021

³⁷ Rahmi Wati, *Pemberdayaan Pejabat Fungsional Tertentu Studi Kasus Pada Jabatan Peneliti Dan Perencana Di Bappeda Provinsi Bengkulu*, Civil Service VOL. 11, No.2, (2017), 68, diakses melalui <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1481189&val=17805&title=PEMBERDAYAAN%20PEJABAT%20FUNGSIONAL%20TERTENTU>, tanggal 21 September 2021.

3. Kendala Dalam Pemberdayaan Tenaga Fungsional Pustakawan

Dalam pemberdayaan pustakawan melalui kegiatan fungsional sangat kerap berhadapan dengan kendala-kendala yang ada, kendala tersebut tidak hanya dari faktor dalam (*internal*) saja, namun juga terdapat dari faktor luar (*eksternal*).

a). Faktor Internal

1. Dari Segi Pustakawan

Dari segi pustakawan faktor internal menyangkut dengan keahlian/skill dari pustakawan agar mampu dan dapat mengembangkan kariernya melalui jabatan fungsional yang dimilikinya. Dengan basic pendidikan di bidang pustakawan paling tidak dapat mengimbangi kebutuhan pemustaka dalam bidang informasi dan pelayanan. Selain dari segi latar belakang (basic) pustakawan harus memiliki kemampuan lain, seperti kemampuan berkomunikasi dengan baik, dapat berbahasa asing, mengembangkan teknik dalam bidangnya.

2. Dari Segi Perpustakaan

Dari segi Perpustakaan, tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap. Perpustakaan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik apabila di dukung oleh sarana prasarana dan pendanaan yang memadai. Ada kalanya dimana dalam mencapai tujuan, sebuah

perpustakaan mengalami kendala dari sisi dana, baik dari pengadaan koleksi, pemenuhan fasilitas, maupun dari segi pelayanan. Hal tersebut sering menjadi masalah bagi perpustakaan kecil, seperti belum tersedianya teknologi computer. Pengadaan koleksi dengan data yang terbatas, sering terjadi prosesnya tidak terseleksi dengan baik.

b) Faktor Eksternal

Banyak pandangan masyarakat awam yang menganggap bahwa pekerjaan perpustakaan dapat dilakukan oleh semua orang tanpa perlu keahlian khusus. Disini terlihat bahwa pandangan masyarakat mengenai profesi pustakawan masih kurang. Disamping itu, dalam pengembangan sebuah perpustakaan dan pembinaan karier pustakawan kurang mendapat perhatian dari pemimpin, yang mana pengembangan perpustakaan dan pembinaan karier pustakawan merupakan tanggung jawabnya. Dilihat dari hal tersebut merupakan kendala bagi pustakawan dalam pemberdayaan IPTEK serta pelaksanaan kegiatan fungsional pustakawan.³⁸

³⁸ Iskandar Sulaiman, *Upaya Memberdayakan Dalam Melaksanakan Kegiatan Fungsional Pustakawan*, Al-Maktabah, Vol, 4, No. 1, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id>

BAB III

METODE PENELITIAN

(1) Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁹ Penelitian kualitatif juga merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan maupun perilaku orang-orang yang sedang diamati, sehingga penelitian dapat mengenali objek dan merasakan apa yang mereka alami.⁴⁰ Data deskriptif yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi yang relevan mengenai berbagai permasalahan yang ditemukan pada saat penelitian dilakukan. Dengan demikian penulis dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai variabel atau kondisi lapangan secara mendalam.

(2) Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian pada skripsi ini dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Penelitian ini berlangsung sejak Oktober 2022. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh karena

³⁹ Basari Sukidi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Perspektif Makro* (Surabaya: Insane Cendikia 2002), hlm 2

⁴⁰ Basari Sukidi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Perspektif Makro* (Surabaya: Insane Cendikia 2002), hlm 2

peneliti ingin melihat bagaimana pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dan apa saja kendala dalam melakukan pemberdayaan tenaga fungsional oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

(3) Fokus Penelitian

Fokus penelitian mempunyai makna batasan penelitian, karena dalam lapangan penelitian banyak gejala yang menyangkut tempat, pelaku, dan aktifitas. Namun tidak semua tempat, pelaku dan aktifitas kita teliti semua. Untuk menemukan pilihan penelitian maka harus mempunyai batasan yang dinamakan fokus penelitian.⁴¹ Fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi penulis sehingga terhindar dan tidak terjebak dalam pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dan luas atau kurang relevan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.

Adapun yang menjadi fokus atau target dalam penelitian ini ada empat indicator yaitu pembinaan karir pustakawan melalui pendidikan, pembinaan karir pustakawan melalui pelatihan, pembinaan karir pustakawan melalui posisi kerja berdasarkan jabatan dan keahlian, pembinaan karir pustakawan melalui organisasi profesi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

(4) Subjek dan Objek Penelitian

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 207.

Subjek penelitian merupakan orang, individu atau lembaga yang dijadikan satuan atau unit yang akan diteliti. Sedangkan objek adalah sifat dari keadaan dari orang, individu, benda atau yang menjadi pusat penelitian.⁴² Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu Tenaga Fungsional Pustakawan bidang pembinaan dan pengembangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Sedangkan yang menjadi objek penelitian yaitu Pemberdayaan Tenaga Fungsional Pustakawan Oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh.

(5) Kredibilitas Data

Uji kredibilitas merupakan kepercayaan atau tingkat ukuran suatu kebenaran data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian kualitatif, dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketentuan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *member check*.⁴³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan perpanjangan pengamatan dan *member check* karena peneliti ingin mendapatkan data yang akurat.

1. Perpanjangan pengamatan adalah peneliti kembali ke lapangan melakukan pengamatan, wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru
2. *Member chek* merupakan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, tujuan *member check* adalah agar

⁴² Muri Yusuf, Metode Penelitian: *Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal 367

⁴³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif; Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*, (Bandung:Alfabate, 2017), hal. 185

informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan sumber data atau informan.⁴⁴

Peneliti menggunakan kedua metode tersebut untuk mengetahui lebih dalam bagaimana Pemberdayaan Tenaga Fungsional Pustakawan Oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh, apa saja kendala dalam melakukan pemberdayaan tenaga fungsional oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dan menyesuaikan dengan data yang sudah peneliti dapatkan sehingga data sesuai dan akurat dengan yang diberikan oleh pemberi data.

(6) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi yaitu peneliti belajar dan mengamati tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.⁴⁵ Metode observasi merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti mengamati secara langsung keadaan di lapangan untuk memperoleh gambaran atau informasi yang lebih luas dan akurat terhadap permasalahan yang diteliti. Observasi yang dilakukan peneliti pada penelitian ini yaitu turun langsung ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, pada bidang pembinaan dan pengembangan agar

⁴⁴ Ibid, 186.

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal 226.

mendapat informasi secara langsung terhadap hal yang berkaitan dengan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat diinstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴⁶ Wawancara ini dilakukan secara langsung bertatap muka dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada kepala bidang pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan dan 5 orang pustakawan yang bersertifikasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh yang telah mengikuti kegiatan pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan. Kegiatan wawancara ini dilakukan dengan cara tatap muka langsung dengan informan.

(7) Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁷ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan utama dari analisis data ialah untuk

⁴⁶ *Ibid*, hal. 317

⁴⁷ *Ibid*, hal. 334

meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan.⁴⁸

Dalam penggunaan analisis kualitatif, maka penginteprestasian terhadap apa yang ditemukan dan pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika. Aktifitas analisis data kualitatif tersebut dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga tuntas.

Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

- a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data kasar yang yang muncul dari catatan-catatan di lapangan.
- b. Penyajian data, yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Menarik kesimpulan, penarikan kesimpulan dilakukan agar data-data yang telah dianalisis dan diberikan penafsiran atau interprestasi tersebut mempunyai makna untuk kemudian dapat disusun menjadi kalimat-kalimat deskriptif yang dapat dipahami oleh orang lain serta menginformasikan mengenai hasil penelitian.

Adapun tahapan-tahapan yang peneliti lakukan dalam menganalisis data yaitu menulis data yang didapatkan, dari hasil wawancara, dan observasi, menyeleksi data yang relevan sesuai tujuan penelitian, dan analisis data lalu menyajikannya dalam bentuk kalimat deskriptif,

⁴⁸ Mohammad Kasiram, *Metode Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang: Alfabeta, 2008), hlm 128.

menarik kesimpulan dan menyusunnya menjadi sebuah laporan penelitian.⁴⁹



⁴⁹ Imam Suprayoga dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm 193.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh merupakan salah satu perpustakaan umum yang ada di provinsi Aceh, berdasarkan undang-undang No. 43 tahun 2007 adapun fungsi perpustakaan yaitu sebagai sistem pengelola rekaman, gagasan, pemikiran, pengalaman dan pengetahuan manusia. Dengan fungsi utamanya yaitu melestarikan hasil budaya umat manusia, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak, karya rekaman, dan berbagai media lainnya serta menyampaikan gagasan, pemikiran dan pengetahuan umat manusia kepada generasi-generasi selanjutnya. Dengan demikian Dinas Perpustakaan dan kearsipan banyak mengalami kemajuan dan telah banyak menyediakan layanan-layanan.

Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

No.	Nama	Golongan	Jabatan
1.	Dr. Edi Yandra, A R S.STP, MSP	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala dinas
2.	Zulkifli, S.Pd., M.Pd	Pembina Tingkat I, IV/b	Sekretaris
3.	Ichsan Pratama, S.STP, M.Si.	Penata Tingkat I, III/d	Perencana ahli muda/sub koordinator bagian program, informasi dan hubungan masyarakat
4.	Nurmaziah, SE.Ak., M.Si	Pembina, IV/a	Analisis keuangan pusat/daerah sub koordinator bagian keuangan dan pengelolaan aset

5.	Safruddin, SE	Penata Tingkat I, III/d	Kepala sub bagian hukum, kepegawaian dan umum
6.	Mountie Syurga, ST, MM	Pembina Utama Muda, IV/c	Kabid. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan
7.	Syahrul, SH Penata Tingkat I, III/d	Penata Tingkat I, III/d	Kabid. Deposit, pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan
8.	Zulfadli, SE, MM	Pembina Tingkat I, IV/b	Kabid. Layanan perpustakaan
9.	Drs. Zuhri, MM	Pembina Tingkat I, IV/b	Kabid. Pengelolaan arsip
10.	Muslem, S.Ag., M.Pd.	Pembina Tingkat I, IV/b	Kabid. Pemanfaatan dan layanan arsip
11.	Yasmi Yendri, S.IP NIP	Penata Tingkat I, III/d	Pustakawan ahli muda/sub koordinator seksi pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan
12.	Muhammad Busyra, SE	Penata Tingkat I, III/d	Pustakawan ahli muda/sub koordinator seksi deposit
13.	Lisa Siska Dewi, S.Sos.	Penata, III/c	Pustakawan ahli muda/sub koordinator seksi layanan perpustakaan
14.	Rini Rovini, SE NIP	Penata Tingkat I, III/d	Arsiparis ahli muda/sub koordinator seksi pengelolaan arsip inaktif
15.	Helmi Syahputra, SE	Penata Tingkat I, III/d	Arsiparis ahli muda/sub koordinator seksi layanan dan pemanfaatan arsip statis
16.	Alfian, S.Sos.	Penata, III/c	Pustakawan ahli muda/sub koordinator seksi pembinaan dan pengawasan kearsipan
17.	Khairuddin, S.Sos.	Penata Tingkat I, III/d	Pustakawan ahli muda/sub koordinator seksi pengolahan dan pengembangan bahan

			perpustakaan
18.	Cut Ruhama, S.Pd.	Penata , III/c	Pustakawan ahli muda/sub koordinator seksi minat dan budaya baca
19.	Asnawi	Penata Tingkat I, III/d	Arsiparis ahli muda/sub koordinator seksi akuisisi dan pengolahan arsip statis
20.	Abdul Aziz, SE	Penata Tingkat I, III/d	Arsiparis ahli muda/sub koordinator seksi penelusuran arsip
21.	Reka Santi, SE	Penata Tingkat I, III/d	Pustakawan ahli muda/sub koordinator seksi pelestarian bahan perpustakaan
22.	Tgk. Nurul Kemala Hayati, SE, MM	Penata Tingkat I, III/d	Pustakawan ahli muda/sub koordinator seksi otomasi perpustakaan
23.	Rahmaniah, SE, MM	Penata Tingkat I, III/d	Arsiparis ahli muda/sub koordinator seksi sistem informasi kearsipan

Tabel 4.1 Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil, dan melayani.

Misi

1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen dan bukti akuntabilitas kinerja pemerintah Aceh.
2. Meningkatkan pelayanan dan sarana kearsipan dan perpustakaan
3. Menggali, menyelamatkan, melestarikan dan memanfaatkan khasanah budaya Aceh dan nilai-nilai dinul Islam

4. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme apparatus kearsipan dan perpustakaan
5. Membina dan mengembangkan minat dan budaya baca
6. Masyarakat meningkatkan peran perpustakaan sebagai sarana dan pembangunan SDM
7. Membina kerja sama kearsipan dan perpustakaan didalam dan luar negeri.⁵⁰

. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pemberdayaan Tenaga Fungsional Pustakawan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

Pada Bab ini diuraikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan observasi, dan wawancara. Adapun hasil wawancara penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan Kasi bidang pembinaan dan pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

Pemberdayaan pustakawan merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pustakawan. Tujuan dari pemberdayaan itu sendiri adalah untuk meningkatkan mutu, keterampilan, serta memupuk kegairahan pustakawan dalam kegiatan fungsionalnya, agar terciptanya mutu pelayanan yang baik dan terciptanya kepuasan pengunjung.⁵¹

Dalam hal ini pemberdayaan pustakawan yang dilakukan oleh Dinas

⁵⁰ Arpus.acehprov.go.id

⁵¹ Rahmi Wati, *Pemberdayaan Pejabat Fungsional Tertentu Studi Kasus Pada Jabatan Peneliti Dan Perencana Di Bappeda Provinsi Bengkulu*, Civil Service VOL. 11, No.2, (2017), 68, diakses melalui <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1481189&val=17805&title=PEMBERDAYAAN%20PEJABAT%20FUNGSIONAL%20TERTENTU>, tanggal 21 September 2021

Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dengan pembinaan karir pustakawan melalui 4 indikator, yaitu:

a. Pembinaan Karir Melalui Pendidikan

Pendidikan merupakan indikator penting dalam menentukan kemampuan kerja pustakawan. Pendidikan merupakan langkah awal untuk melihat kemampuan seorang pustakawan. Pembinaan karir pustakawan melalui pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan, intelektual, serta pengalamannya sehingga mempunyai bekal dalam usaha meningkatkan karir kepustakawannya. Jenis Pendidikan yang dimaksud disini terbagi kepada:

1. Pendidikan Formal

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pustakawan, peneliti mendapatkan hasil jawaban bahwasanya

*“Hampir semua pustakawan yang bekerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sudah melanjutkan pendidikan formal. saat ini sekitar kurang lebih 14 orang dari bidang perpustakaan, ada sekitaran 11 yang dari D III melanjutkan SI, tiga diantaranya yang belum melaksanakan dikarenakan tiga orang tersebut merupakan staf baru”.*⁵²

No.	Nama	Jenjang pendidikan	Ket
1.	Yasmi Yendri, S.IP	Strata 1	D III ke SI
2.	Muzakkir, S.IP	Strata 1	D III ke SI
3.	Susanna, S.IP	Strata 1	D III ke SI
4.	Rahma, S.IP	Strata 1	D III ke SI

⁵² Wawancara dengan pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh pada tanggal 30 November 2022.

5.	Yulizardi, S.IP	Strata 1	D III ke SI
6.	Nurul Husna, S.IP	Strata 1	D III ke SI
7.	Nurmala, Dewi, S.IP	Strata 1	D III ke SI
8.	Lindawati, S.IP	Strata 1	D III ke SI
9.	Fitriani, S.IP	Strata 1	D III ke SI
10.	Ulfa Fajrina, S.IP	Strata 1	D III ke SI
11.	Liza Ummami, S. IP	Strata 1	D III ke SI
12.	Khairiah, A.Md	-	-
13.	Zuharni, A.Md	-	-
14.	Muharramah, A.Md	-	-

Tabel 4.2 Jenjang Pendidikan Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

2. Pendidikan Non Formal

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kasi bidang pembinaan dan pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh,

*“Untuk tahun ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh mengadakan kegiatan pendidikan non formal talkshow gemar membaca, roadshow atau kampanye membaca ke daerah kabupaten terpilih di Aceh dan Pembinaan perpustakaan ke Kabupaten Kota, disitu kami ikutkan pustakawannya, kalau ada kegiatan yang bersifat teknis lebih mengutamakan pustakawan dari pada staf”.*⁵³

“Kemudian Perpunas RI setiap tahunnya mengadakan kegiatan pendidikan non formal semisal Diklat inpassing (program alih jalur dari structural ke pustakawan), promosi perpustakaan berbasis digital, layanan perpustakaan dan Seminar peningkatan literasi masyarakat, dengan mengundang Dinas-dinas perpustakaan di setiap provinsi termasuk Aceh.

⁵³ Wawancara dengan pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh pada tanggal 30 November 2022.

*Dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh selalu mengutus pustakawan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Namun dari setiap kegiatan ini tidak semua pustakawan dilibatkan melainkan ada beberapa pustakawan yang dipilih untuk mengikuti setiap kegiatan tersebut”.*⁵⁴

Berdasarkan uraian di atas, pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan melalui pembinaan pendidikan formal dan non formal berjalan dengan maksimal, hal ini dapat dilihat dari jumlah pustakawan yang hampir seluruhnya sudah melanjutkan pendidikan formal dari pustakawan tingkat terampil lulusan D2 atau D3 untuk melanjutkan ke jenjang Strata satu (S1) Ilmu Perpustakaan. Untuk pendidikan non adanya diklat alih jalur dari structural ke pustakawan. Hal ini mampu menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman yang bermanfaat untuk para pustakawan terutama memperbanyak bekal dalam proses perjalanan karirnya.

b. Pembinaan Karir Pustakawan melalui Pelatihan

Pelatihan juga merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan dan mengembangkan wawasan seorang pustakawan dalam menunjang kegiatan kepustakawanannya, sehingga pustakawan mampu menciptakan lingkungan kerja yang aktif serta menimbulkan karir yang cemerlang. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Yasmi, Kasi Bidang Pembinaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh pada tanggal 30 November 2022.

kasi bidang pembinaan dan pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh,

“Hampir semua pustakawan ada mengikuti bimtek dan pelatihan kepustakawanan. Ada beberapa pelatihan yang dibuat oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh diantaranya pelatihan inlislite, bimtek story telling, dan bimbingan pengkatalogan, pengklasifikasian untuk pembinaan perpustakaan sekolah tingkat menengah yang juga diikuti oleh pustakawan dari DPKA sendiri. Selain dari pada itu pustakawan DPKA juga mengikuti Bimbingan teknis TIK transformasi perpustakaan berbasis inklusi social yang melibatkan perpustakaan umum kabupaten dan perpustakaan desa yang diadakan oleh Perpustakaan Nasional RI.”⁵⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan melalui pembinaan karir pustakawan melalui pelatihan berjalan dengan maksimal, hal ini dapat dilihat dari hampir semua pustakawan DPKA sudah mengikuti pelatihan dalam bentuk bimbingan teknis inlislite, bimtek story telling, dan bimbingan pengkatalogan, pengklasifikasian yang diadakan oleh DPKA sendiri maupun pelatihan yang diadakan oleh pihak perpustakaan nasional RI dengan harapan agar pustakawan tersebut mendapatkan ilmu dan dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan tugas kepustakawannya.

c. Pembinaan Karir Pustakawan Melalui Posisi Kerja Berdasarkan Keahlian

Keahlian merupakan poin yang sangat penting yang terdapat dalam diri pustakawan. Setiap pustakawan mempunyai keahlian

⁵⁵ Wawancara dengan Kasi Bidang Pembinaan dan Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh pada tanggal 1 desember 2022.

tertentu, oleh sebab itu setiap pustakawan harus ditempatkan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Hal ini dilakukan agar pekerjaan yang dilaksanakan menjadi lancar.

Adapun terkait pembinaan karir pustakawan melalui posisi kerja yaitu:

*“Setiap pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh ditempatkan berdasarkan bidang dan keahlian tertentu. Di beberapa bidang tertentu memang ditempatkan pustakawan dari latar belakang SI ilmu perpustakaan tetapi ada juga pegawai yang dari sarjana dari keilmuan yang lain kami berikan penempatan kerja sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, kalau pegawai ASN itu kan di atur oleh pemerintah jadi ya kami mengikuti apa yang di putuskan oleh pemerintah”.*⁵⁶

Berdasarkan wawancara peneliti dengan kasi Pembinaan, beliau mengungkapkan:

*“Setiap pustakawan diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan struktural. Pustakawan yang selama menjabat struktural untuk sementara jabatan fungsionalnya di non aktifkan, tidak lagi sebagai pustakawan namun jika masa jabatan habis dan tidak dilantik sebagai jabatan struktural maka mereka kembali menjadi pustakawan.⁵⁷sejalan dengan pendapat di atas ibu Mala selaku pustakawan juga menambahkan salah satu contohnya ibu Yasmi beliau merupakan seorang pustakawan yang menjabat sebagai kasi pembinaan”.*⁵⁸

⁵⁶ Wawancara dengan pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh pada tanggal 30 November 2022.

⁵⁷ Wawancara dengan Kasi Bidang Pembinaan dan Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh pada tanggal 1 Desember 2022.

⁵⁸ Wawancara dengan Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh pada tanggal 1 Desember 2022.

No.	Nama	Posisi Awal	Posisi Sekarang
1.	Tgk Nurul Kemalayahati, SE	Pustakawan Ahli Muda	Kasi Otomasi Perpustakaan
2.	M. Busyra, SE	Pustakawan Ahli Muda	Kasi Deposit
3.	Khairuddin, S.sos	Pustakawan Ahli Muda	Kasi Pengolahan Dan Pengembangan Bahan Perpustakaan
4.	Yasmi Yendri, S.IP	Pustakawan Ahli Muda	Kasi Pembinaan Dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan

Tabel 4.3 Jabatan Struktural Pustakawan

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwasanya pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan melalui pembinaan posisi kerja berdasarkan keahlian sudah hampir maksimal hal ini dilihat dari penempatan pustakawan sesuai dengan bidang keahlian dan latar belakang pendidikan, namun ada juga beberapa yang belum sesuai hal ini disebabkan mutasi ASN yang diatur oleh pemerintah. Kemudian untuk jabatan structural pustakawan diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan structural nantinya akan ada syarat tertentu serta yang mengangkat adalah Pemerintah Daerah.

d. Pembinaan Karir Pustakawan Melalui Organisasi Profesi

Pustakawan mempunyai organisasi resmi yakni IPI (ikatan pustakawan Indonesia). Dengan adanya organisasi profesi ini diharapkan pustakawan mampu mengembangkan dan mengasah skill yang dimiliki dengan cara diskusi ilmiah bersama sesama pustakawan, mengikuti Rapat Kerja Nasional, seminar, workshop dan lain-lain yang diadakan oleh IPI.

Salah satu pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh mengatakan saat ini semua pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh menjadi anggota dan ada 10 orang yang menjadi pengurus IPI Aceh.⁵⁹

No.	Nama	Organisasi	Ket
1.	Zulkifli, S.PD, M.Pd	IPI Aceh (Anggota Pembina)	Dispusip Prov Aceh
2.	Tgk. Nurul Kemala Hayati, SE, MM	IPI Aceh (Pengurus Daerah)	Dispusip Prov Aceh
3.	Muzakkir, S.IP	IPI Aceh (Annggota Bidang Organisasi dan Keanggotaan)	Dispusip Prov Aceh
4.	Fauzah Radiah, S.Pd.I	IPI Aceh (Anggota Bidang Pengembangan Profesi, pendidikan, dan Pelatihan)	Dispusip Prov Aceh
5.	Listryani, SE	IPI Aceh (Anggota Bidang Pengembangan Profesi, pendidikan, dan Pelatihan)	Dispusip Prov Aceh
6.	Yasmi Yendri, S.IP	IPI Aceh (Ketua Bidang Pengembangan Masyarakat dan Pengembangan Literasi)	Dispusip Prov Aceh
7.	Drs. M. Yusuf	IPI Aceh (Anggota Sertifikasi,	Dispusip Prov Aceh

⁵⁹ Wawancara dengan pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh pada tanggal 30 November 2022.

		Akreditasi, dan penilaian angka kredit)	
8.	Susanna, S.IP	IPI Aceh (Anggota Sertifikasi, Akreditasi, dan penilaian angka kredit)	Dispusip Prov Aceh
9.	Rahma, S.IP	IPI Aceh (Anggota Sertifikasi, Akreditasi, dan penilaian angka kredit)	Dispusip Prov Aceh
10.	Yulizardi, S.IP	IPI Aceh (Anggota Sekretariat)	Dispusip Prov Aceh
11.	Nurul Husna, S.IP	IPI Aceh (Anggota Sekretariat)	Dispusip Prov Aceh
12.	Nurmala, Dewi, S.IP	IPI Aceh (Anggota Sekretariat)	Dispusip Prov Aceh
13.	Lindawati, S.IP	IPI Aceh (Anggota Sekretariat)	Dispusip Prov Aceh
14.	Muharramah, A.Md	IPI Aceh (Anggota Sekretariat)	Dispusip Prov Aceh

Tabel 4.4 Pengurus dan Anggota IPI Aceh Dispusip Prov Aceh

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwasanya pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan melalui pembinaan organisasi profesi sudah maksimal, hal ini dilatarbelakangi oleh organisasi IPI Aceh berjalan dengan semestinya sebagai wadah pustakawan, sehingga menyebabkan pustakawan yang tergabung

sebagai anggota ataupun yang terlibat dalam kepengurusan dapat mengembangkan *skill* nya secara optimal berjalan dengan optimal.

2. Kendala Dalam Melakukan Pemberdayaan Tenaga Fungsional Pustakawan Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

Dalam melakukan pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh memiliki beberapa kendala baik dari segi faktor dalam (*internal*), dan juga dari faktor luar (*eksternal*).

a. Faktor Internal

Dari segi kendala internal, kesesuaian jadwal antara bidang satu dengan bidang lainnya menjadi factor kendala, hal ini disampaikan oleh Ibu Yasmi selaku kasi bidang pembinaan

Kasi bidang pembinaan menuturkan bahwasanya *pada saat melakukan pembinaan harus mencari waktu yang sesuai. Contohnya bidang pembinaan melakukan pemberdayaan pustakawan melalui Pembinaan perpustakaan ke Kabupaten Kota dengan melibatkan pustakawan bidang layanan, sementara bidang layanan ada tupoksi sendiri yang sedang dilakukan, oleh karena itu terkadang ada waktu yang bentrok antara bidang layanan dengan bidang pembinaan.*⁶⁰

Berdasarkan uraian di atas, kesesuaian jadwal antara bidang satu dengan lainnya menjadi salah satu kendala, hal ini disebabkan pada saat melakukan pemberdayaan pustakawan, pihak bidang pembinaan tidak hanya melibatkan pustakawan bidang pembinaan saja

⁶⁰ Wawancara dengan Kasi Bidang Pembinaan dan Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh pada tanggal 1 desember 2022.

namun juga melibatkan seluruh pustakawan dari beberapa bidang yang terdapat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh salah satunya bidang pelayanan.

b. Faktor Eksternal

1. Keterbatasan Anggaran

Anggaran merupakan sebuah hal penting yang perlu dipersiapkan dalam sebuah organisasi atau institusi agar dapat menampung kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.

Menurut kasi pembinaan: *“Perpustakaan kita mendapatkan sumber dana dari APBD dan APBN, dari dana itu kita sinkronasikan dengan kebutuhan perpustakaan. Di DPKA, terkadang anggaran yang didapatkan jumlahnya kurang untuk melaksanakan program-program yang direncanakan di RKA, tidak semua anggaran di alokasikan ke pemberdayaan pustakawan terkadang ada juga program-program dan kegiatan lainnya seperti lomba bertutur yang diadakan juga memerlukan biaya yang besar. Hal ini tentu mengurangi anggaran yang kita punya untuk memberdayakan pegawai kita, oleh karena itu kita fokus satu per satu terlebih dahulu”*.⁶¹

Berdasarkan uraian di atas, anggaran merupakan kendala eksternal dalam sebuah perpustakaan, hal ini dikarenakan anggaran bersumber dari APBD dan APBN, oleh karena itu pustakawan tidak mempunyai kewenangan terhadap jumlah anggaran yang telah

⁶¹ Wawancara dengan Kasi Bidang Pembinaan dan Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh pada tanggal 1 desember 2022.

dialokasikan sehingga berapapun anggaran yang ada itulah yang di pergunakan oleh pustakawan.

2. Kebijakan

Selain dari keterbatasan anggaran, kebijakan juga menjadi kendala eksternal, hal ini disampaikan langsung oleh Kasi bidang pembinaan bahwasanya:

*“Berdasarkan kebijakan dari pemerintah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh hanya melakukan pembinaan perpustakaan untuk tingkat perpustakaan Kabupaten/kota dan pembinaan perpustakaan ke sekolah tingkat SMA dan SMK/ sederajat. Sementara untuk tingkat SMP dan SD itu tidak bisa karena tidak diakui oleh pemerintah dikarenakan perpustakaan tingkat SD, SMP berada di bawah wewenang Dinas Perpustakaan tingkat Kabupaten sendiri ”.*⁶²

Dari keterangan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, berdasarkan kebijakan pemerintah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh hanya melakukan pembinaan perpustakaan untuk tingkat perpustakaan Kabupaten/kota, dan perpustakaan sekolah tingkat SMA dan SMK/ sederajat. Sementara untuk perpustakaan sekolah tingkat SD, SMP dilakukan oleh perpustakaan wilayah Kabupaten.

C. Pembahasan

Pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan merupakan pembinaan terhadap sumber daya manusia yang ada di perpustakaan yaitu pustakawan.

⁶² Wawancara dengan Kasi Bidang Pembinaan dan Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh pada tanggal 1 desember 2022.

Diperlukan sebuah pembinaan bagi profesi pustakawan, untuk meningkatkan mutu serta kualitas tiap-tiap pustakawan. Konsep pemberdayaan pustakawan dilakukan dengan pembinaan karir pustakawan melalui 4 indikator yaitu pembinaan karir pustakawan melalui pendidikan, pelatihan, posisi kerja berdasarkan jabatan dan keahlian, dan organisasi profesi.⁶³

Pendidikan merupakan indikator yang mencerminkan kemampuan seorang pustakawan untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya. Pembinaan karir pustakawan melalui pendidikan diharapkan para pustakawan mampu meningkatkan kemampuan, intelektual, serta pengalamannya sehingga mempunyai bekal dalam usaha meningkatkan karir kepustakawannya. Terdapat beberapa macam jenis pendidikan, diantaranya pendidikan formal yaitu Pendidikan pustakawan melalui pendidikan formal dapat dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan tinggi, seperti universitas, institut, atau sejenisnya yang menyelenggarakan program diploma, sarjana, magister atau doktor di bidang perpustakaan sedangkan pendidikan non formal yaitu pendidikan yang dilakukan melalui pelatihan (*diklat*), penataran (*up grading*), simposium, seminar, lokakarya, kursus, magang (*on the job training*), studi banding, dan sebagainya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pustakawan secara bersama-sama.

⁶³ Muhammad Rum, *Model Pembinaan Karir Pustakawan di Lingkungan Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Provinsi Jambi*. (Jambi: 2013) hal 10.

Hasil wawancara peneliti dengan informan, hampir semua pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh telah melakukan pembinaan karir pustakawan melalui pendidikan formal dan non formal. Bentuk pendidikan formal yang mereka laksanakan dari pustakawan tingkat terampil lulusan D2 atau D3 untuk melanjutkan ke jenjang Strata satu (S1) Ilmu Perpustakaan. Untuk pendidikan non formal adanya diklat inpassing (alih jalur dari structural ke pustakawan), seminar *talkshow* gemar membaca, peningkatan literasi masyarakat, promosi perpustakaan berbasis digital, layanan perpustakaan, yang diadakan oleh perpustakaan nasional serta roadshow atau kampanye membaca ke daerah Kabupaten terpilih di Aceh dan Pembinaan perpustakaan ke Kabupaten Kota yang merupakan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sendiri.

Pelatihan juga merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan dan mengembangkan wawasan seorang pustakawan dalam menunjang kegiatan kepustakawannya, sehingga pustakawan mampu menciptakan lingkungan kerja yang aktif serta menimbulkan karir yang cemerlang. Pembinaan karir pustakawan melalui pelatihan atau bimbingan teknis merupakan suatu kegiatan dimana para peserta diberikan pelatihan berupa tuntutan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi yang bersifat teknis untuk memecahkan permasalahan dan menyelesaikan pekerjaan.

Hasil wawancara peneliti dengan informan, hampir semua pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sudah mengikuti bimtek dan pelatihan kepustakawanan yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional RI diantaranya pelatihan inlislite, bimtek story telling, dan bimbingan pengkatalogan, pengklasifikasian, pembinaan perpustakaan sekolah tingkat menengah. Selain dari pada itu pustakawan DPKA juga mengikuti Bimbingan teknis TIK transformasi perpustakaan berbasis inklusi social yang melibatkan perpustakaan umum kabupaten dan perpustakaan desa yang diadakan oleh Perpustakaan Nasional RI.

Dalam suatu organisasi pemerintahan maka akan dikenal istilah jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu sistem organisasi negara. Sedangkan jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Hasil wawancara peneliti dengan informan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh menempatkan pustakawan sesuai dengan bidang keahlian dan latar belakang pendidikan, namun ada juga beberapa yang belum sesuai hal ini

disebabkan mutasi ASN yang di atur oleh pemerintah. Kemudian untuk jabatan structural pustakawan diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan structural yang nantinya akan ada syarat tertentu serta yang mengangkat adalah Pemerintah Daerah.

IPI (ikatan pustakawan Indonesia) merupakan organisasi Pustakawan resmi, Dengan adanya organisasi profesi ini diharapkan pustakawan mampu mengembangkan dan mengasah *skill* yang dimiliki dengan cara diskusi ilmiah bersama sesama pustakawan, mengikuti Rapat Kerja Nasional, seminar, workshop dan lain-lain yang diadakan oleh IPI.

Hasil wawancara peneliti dengan informan, saat ini ada 10 orang pustakawan Dinas Perpustakaan dan kearsipan Aceh yang menjadi pengurus IPI Aceh dan semua pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh termasuk ke dalam anggota IPI Aceh.

Dalam melakukan pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh memiliki tiga kendala yang dihadapi di antaranya:

1. Yang pertama Kesesuain jadwal antara bidang satu dengan bidang lainnya, hal ini didasari oleh pustakawan yang terdapat di beberapa bidang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri oleh sebab itu saat melakukan pembinaan

pustakawan harus adanya penyesuaian jadwal setiap pustakawan dari DPKA.

2. Keterbatasan Anggaran/Dana

Anggaran merupakan sebuah hal yang perlu disiapkan dalam sebuah organisasi atau institusi agar dapat menampung kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Sumber dana Perpustakaan dari APBD dan APBN. Terkadang anggaran yang didapatkan jumlahnya kurang untuk melaksanakan program-program yang direncanakan di RKA, tidak semua anggaran di alokasikan ke pemberdayaan pustakawan terkadang ada juga program-program dan kegiatan lainnya yang diadakan memerlukan biaya yang besar.

3. Kebijakan

Merupakan pernyataan tertulis tentang kebijakan yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembinaan perpustakaan sekolah. Dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh hanya melakukan pembinaan perpustakaan untuk tingkat Kab Kota dan pembinaan perpustakaan ke sekolah tingkat SMA dan SMK/ sederajat sementara untuk tingkat SMP dan SD itu tidak dilaksanakan dikarenakan factor kebijakan dari pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dilakukan melalui empat bentuk pembinaan pustakawan yaitu pembinaan karir pustakawan melalui pendidikan formal dan non formal dengan melanjutkan pendidikan formal serta diklat alih jalur dari structural ke pustakawan, pembinaan karir pustakawan melalui pelatihan inlislite, bimbingan pengkatalogan, dan lain sebagainya, pembinaan karir pustakawan melalui posisi kerja berdasarkan jabatan dan keahlian, dan pembinaan karir pustakawan melalui organisasi profesi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang kiranya perlu dipertimbangkan antara lain:

1. Untuk kegiatan pemberdayaan

Secara umum untuk kegiatan pemberdayaan yang sudah diikuti oleh pustakawan Dinas Perpustakaan dan kearsipan Aceh berjalan dengan sangat baik. Namun perlu adanya alokasi dana atau anggaran khusus

untuk kegiatan pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan tersebut agar setiap tahunnya pustakawan dapat *mengupgrade* kemampuan kepustakawannya sehingga mereka tidak merasa kesulitan dalam melaksanakan tugas di perpustakaan.

2. Untuk Pustakawan

Dengan adanya pemberdayaan ini, diharapkan kepada pustakawan untuk dapat mengaplikasikan kegiatan pemberdayaan yang telah diikuti dengan sesuai di perpustakaan.



Daftar Pustaka

- Edi Sugarto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Ravika Adimatama 2005).
- Erya Afrianus, *Lebih Dekat Dengan Jabatan Fungsional*, 1, diakses melalui <https://pusdiklat.bps.go.id/>
- Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT Pusaka Cisendo,1996).
- Haris Ihsanil Huda, Tristiana Rijanti, *Pengaruh Pemberdayaan Dan Leader Member Exchange Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Self Efficacy Sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada Rumah Sakit Baitul Hikmah Kendal Bagian Medis)*, Telaah Manajemen Vol. 13 Edisi 2, (2016), 83, diakses melalui <http://download.garuda.ristekdikti.go.id>.
- Johny Urbanus Lesnussa, *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Di Negeri Halong Baguala Ambon*, diakses melalui Jurnal Sosio Sains Vol 5, No, 2, (2019).
- Lasa Hs, *Kamus Kepustakawanan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009)
- Maya Nurmaya Hasanah, *Pengaruh Jabatan Fungsional Terhadap Kinerja Pustakawan Di Perpustakaan Universitas Indonesia*, Jurnal Ilmu Perpustakaan, Vol. 7 No. 1, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2019), 7, diakses melalui <https://ejournal3.undip.ac.id>.
- Perpustakaan Nasional, *Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2015).
- Rahmi Wati, *Pemberdayaan Pejabat Fungsional Tertentu Studi Kasus Pada Jabatan Peneliti Dan Perencana Di Bappeda Provinsi Bengkulu*, Civil Service VOL. 11, No.2, (2017), 68, diakses melalui <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/>
- Rosmedi Dan Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006),
- Sri Hariyanti, Noviliya, *Pengaruh Pemberdayaan Kinerja Fungsional Pustakawan Terhadap Kualitas Perpustakaan (Studi Kasus Perpustakaan Daerah Kota*

Kediri),(Kediri:InstitutAgama Islam Negeri Kediri, 2020), 4, <https://jurnal.iaik Kediri.ac.id>.

Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media,2007).



**NOTA USUL UJIAN MUNAQASYAH PROGRAM S-1
ILMU PERPUSTAKAAN (IP)
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

NOMOR : B-180/Un.08/IP/KS.01.7/12/2022

Prodi Ilmu Perpustakaan (IP), setelah memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa:

No	Nama Mahasiswa / NIM	: RENA SARIRA / 170503132
1.	Tempat / Tanggal Lahir	: KUTA BULOH II, 08 November 1999
2.	Nilai Ujian Konfrehensif Rata-rata	: 82 / B
3.	Judul Skripsi	: Pemberdayaan Tenaga Fungsional Pustakawan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
4.	Pembimbing I	: Nurrahmi, S.Pd.I., M.Pd.
5.	Pembimbing II	: T. Mulkan Safri, M.IP.

telah menyelesaikan semua mata kuliah (kecuali tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi) dan persyaratan lainnya, maka kami usulkan untuk menempuh ujian munaqasyah dengan tim penguji sebagai berikut:

Bidang	Penguji
1. Permasalahan dan metodologi	: Drs. Saifuddin A. Rasyid, M.L.I.S.
2. Teori dan hasil penelitian	: Nurul Rahmi, S.IP., M.A.

Susunan lengkap Tim Pelaksana Munaqasyah Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi

No	Nama Penguji	Jabatan
1.	Nurrahmi, S.Pd.I., M.Pd.	: Ketua
2.	T. Mulkan Safri, M.IP.	: Sekretaris
3.	Drs. Saifuddin A. Rasyid, M.L.I.S.	: Penguji I
4.	Nurul Rahmi, S.IP., M.A.	: Penguji II

Hari / Tanggal Ujian : Selasa, 27 Desember 2022
Jam : 11:40 s.d 01:10
Tempat : RS. PRODI IP

Banda Aceh, 23 Desember 2022

Wakil Dekan I



Nazaruddin, S.Ag, S.S, M.L.I.S.

Scan Disini



جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Catatan:

Copy 9 eks untuk : 1. Sub Bag Akademik 2. Sub Bag Umum 3. Tim Penguji (dilampirkan dengan Skripsi) 2 Eks 4. Pembimbing (dilampirkan dengan Skripsi) 2 Eks 5. Ketua Laboratorium 6. Ketua Prodi Ilmu Perpustakaan 7. Mahasiswa Ybs

Dokumentasi Penelitian





جامعة الرانيرى

AR - RANIRY